

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan yang semakin bertambah dan beragam akibat kemajuan teknologi dan berkembangnya gaya hidup membuat para pelaku industri semakin kompetitif. Kemajuan teknologi ini memaksa pelaku usaha untuk beralih dari cara tradisional ke teknologi digital untuk tetap bertahan di iklim usaha saat ini. Perubahan ke teknologi digital atau adopsi teknologi dan data digital untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan nilai dari suatu aktivitas, fungsi atau model bisnis disebut dengan digitalisasi (Heryana dkk., 2023).

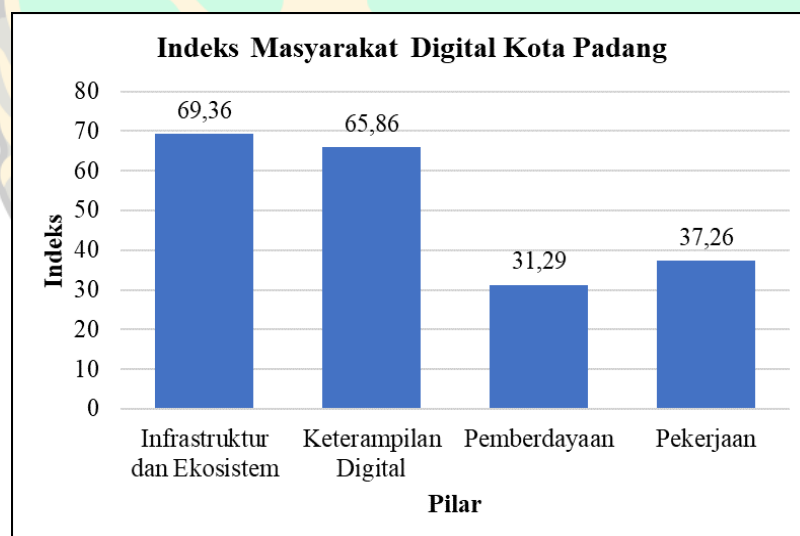
Sejalan dengan upaya digitalisasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan survei Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang mengukur kemampuan masyarakat dalam menyikapi dan beradaptasi dengan teknologi. Pada tahun 2023, nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) secara nasional meningkat sebesar 5,38 dari tahun sebelumnya menjadi 43,18. Provinsi DKI Jakarta memegang peringkat pertama dengan nilai IMDI tertinggi sebesar 51,2. Provinsi Sumatera Barat sendiri menempati peringkat keempat di Indonesia dengan nilai IMDI sebesar 46,1. Secara nasional, indeks pemberdayaan digital masih menjadi indeks terendah. Hal ini juga terjadi di Pulau Sumatera yang disajikan **Tabel 1.1** berikut.

Tabel 1.1 Nilai Indeks Pemberdayaan Digital di Pulau Sumatera

Peringkat	Provinsi	Indeks Pemberdayaan
1	Kepulauan Riau	29,68
2	Jambi	27,72
3	Aceh	27,51
4	Bangka Belitung	27,39
5	Riau	27,24
6	Lampung	26,84
7	Bengkulu	26,02
8	Sumatera Barat	26,02
9	Sumatera Selatan	24,89
10	Sumatera Utara	24,69

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023

Nilai indeks pemberdayaan pada **Tabel 1.1** menunjukkan bahwa Sumatera Barat sebesar 26,02 dari skala indeks 100 dan pada peringkat ke-8 dalam indeks pemberdayaan teknologi digital di Pulau Sumatera. Indeks pemberdayaan teknologi Sumatera Barat dibandingkan provinsi lain yang ada di Indonesia menempati urutan ke-20 dari 34 provinsi. Hal serupa juga terjadi Kota Padang dengan indeks infrastruktur dan ekosistem digital sebesar 69,36 dan indeks pemberdayaan digital sebesar 31,29 yang terlihat dari diagram batang pada **Gambar 1.1**.

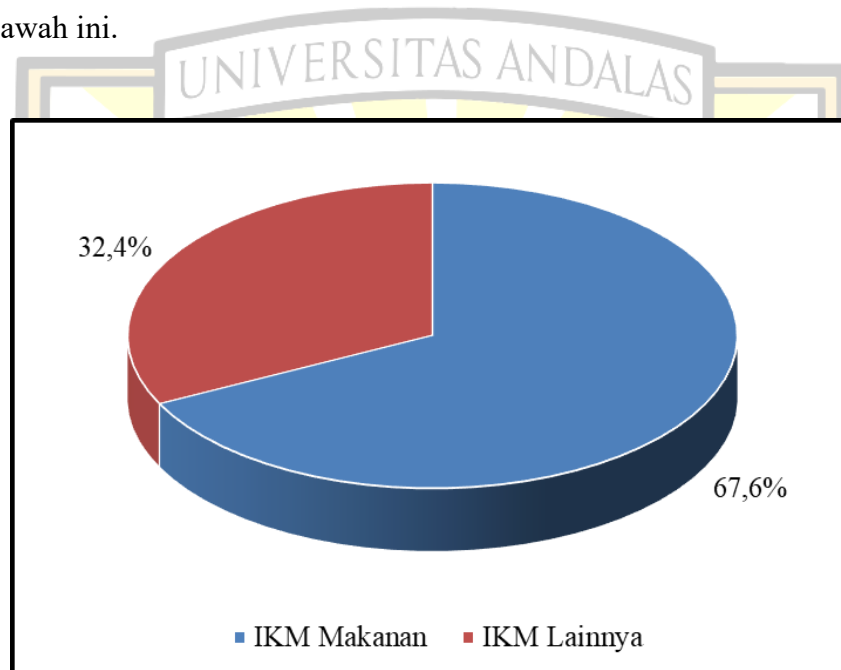


Gambar 1.1 Nilai Indeks Pemberdayaan Digital di Kota Padang
(Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023)

Ketimpangan nilai antara indeks infrastruktur dan ekosistem yang dapat dilihat pada **Gambar 1.1**. Pilar pemberdayaan merupakan salah satu dari empat pilar yang menunjukkan kemampuan digital masyarakat untuk melakukan aktivitas digital yang meningkatkan taraf hidup (pemberdayaan ekonomi) dan menghasilkan pendapatan. Pilar ini menekankan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan peranan *sharing economy* dalam proses digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang sudah cukup memiliki kesetaraan akses infrastruktur digital yang baik mulai dari adanya akses dan adopsi teknologi, akses pembelajaran teknologi dan dukungan pemerintah. Akan tetapi, kesetaraan infrastruktur ini masih belum diberdayakan dengan baik oleh masyarakat. Hal tersebut akan memungkinkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi kendala dan sulit untuk menjual produk atau jasa secara efisien karena tidak bisa menjangkau pelanggan baru di pasar *online*. Selain itu, kurangnya penerapan teknologi digital juga akan lebih sulit untuk melakukan analisis data untuk membuat keputusan bisnis dan dapat membuat bisnis menjadi lambat serta rentan terhadap gangguan.

UMKM yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan industri kecil dan menengah (IKM). Industri kecil dan menengah (IKM) menurut Peraturan Menteri No.64/M-IND/PER 7/2016 adalah segala aktivitas ekonomi yang menggunakan bahan baku dan sumber daya industri untuk membuat produk dengan nilai tambah yang tinggi dan menghasilkan keuntungan besar. Investasi harus dalam kisaran antara 1 miliar hingga 15 miliar rupiah, termasuk tanah dan bangunan, dengan jumlah karyawan maksimal 20 orang untuk dapat dikatakan sebagai IKM (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2016). Sepanjang tahun 2023, populasi industri kecil dan menengah (IKM) mencapai 4,19 juta unit usaha, atau sebesar 99,7 persen dari total unit usaha industri di Indonesia, menunjukkan bahwa IKM terus memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional. IKM memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2024). Selain itu, salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung IKM adalah industri makanan.

Industri makanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dan potensi yang besar dalam mendukung perekonomian Indonesia. Pada triwulan-I tahun 2024, industri makanan merupakan salah satu industri yang berkontribusi sebesar 39,91%, atau 6,47% dari total PDB Nasional (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2024). Hal ini juga terjadi di Kota Padang yang dapat dilihat dari dominasi industri makanan dibanding industri lainnya berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang disajikan pada **Gambar 1.2** di bawah ini.



Gambar 1.2 Perbandingan Persentase Industri Makanan dan Industri Lainnya

(Sumber: Data Olahan Peneliti, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2024)

Diagram lingkaran pada **Gambar 1.2** menunjukkan bahwa industri makanan mendominasi sebesar 67,6% atau 5932 unit dari total keseluruhan IKM yaitu 8774 unit yang mengindikasikan bahwa industri makanan salah satu penopang IKM di Kota Padang. Industri makanan di Kota Padang sebagai bagian penting dari IKM, memiliki berbagai kegiatan mulai dari proses produksi, pemasaran dan penjualan produk, manajemen rantai pasok, manajemen sumber daya manusia, pengembangan pasar, serta kerjasama bisnis. Manajemen rantai pasok berkaitan dengan pengelolaan bisnis seperti pembuangan produk, pengerjaan ulang atau pemrosesan ulang, layanan pelanggan, distribusi, produksi dan pengadaan bahan.

Bertujuan untuk mencukupi harapan pelanggan, setiap rantai pasok pasti ingin meningkatkan kinerjanya (Reddy dkk., 2019). Akan tetapi, dalam prosesnya rantai pasok tidak dapat terhindar dari pengaruh gangguan tak terduga dalam aliran informasi, barang, dan jasa, yang berpotensi menurunkan kinerja rantai pasokan. Gangguan ini mungkin terjadi di berbagai tahap dalam alur produksi atau distribusi dalam rantai pasokan. Salah satu contoh gangguan yang pernah terjadi ialah pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019. Gangguan Covid-19 berdampak banyak pada semua lini kehidupan dan mengubah banyak aspek aktivitas operasional bisnis di berbagai sektor salah satunya sektor industri.

Era setelah pemulihan pandemi COVID-19 disebut sebagai “era *new normal*”. Era ini membawa banyak aspek *new normal* di bidang ekonomi, sosial dan teknologi serta dipenuhi dengan tantangan, ketidakpastian, dan ketidakstabilan yang menyebabkan ketangkasan, keingintahuan, mitigasi risiko, fokus, dan eksplorasi sangat dibutuhkan (Ajmal dkk., 2022). Salah satu sistem yang harus ikut beradaptasi dan mengalami transformasi ulang dalam menghadapi *new normal* adalah rantai pasok. Menurut Ivanov (2020), ketahanan rantai pasokan menjadi topik yang semakin banyak dibicarakan seiring dengan penyebaran pandemi Covid-19. Bisnis di lingkungan yang bergejolak memerlukan ketahanan rantai pasokan agar siap mendeteksi perubahan, memahami perubahan dan beradaptasi terhadap perubahan, sehingga memberikan keunggulan kompetitif (Vidrova, 2020). Digitalisasi dapat menjadi jalan untuk meningkatkan resiliensi rantai pasok.

Pengaruh digitalisasi terhadap resiliensi rantai pasok telah dibahas pada beberapa penelitian terdahulu. Zouari dkk. (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi rantai pasokan dapat meningkatkan kemampuan rantai pasokan untuk menyerap, merespon, dan pulih dari gangguan. Zhao dkk. (2023) juga menemukan bahwa digitalisasi rantai pasok berdampak positif pada ketiga kemampuan resiliensi rantai pasok dan kinerja rantai pasokan. Digitalisasi tidak hanya memberikan pengaruh terhadap resiliensi rantai pasokan tetapi juga pada integrasi rantai pasokan. Adanya teknologi digital juga dapat memudahkan perusahaan untuk melakukan integrasi internal dan berbagi informasi perencanaan sumber daya perusahaan. Hal ini

memudahkan untuk bekerja sama dan berkolaborasi secara strategis dan lintas fungsi (Oubrahim dkk., 2023). Menurut Kache & Seuring (2017), digitalisasi dapat meningkatkan rantai pasok dengan cara meningkatkan ketersediaan informasi dan mengoptimalkan logistik antar-perusahaan. Pertukaran informasi yang baik dapat memudahkan perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dan dapat merespon perubahan pasar secara cepat.

Penelitian terdahulu telah membahas pengaruh digitalisasi terhadap integrasi rantai pasok. Yu (2015) melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur di China menunjukkan adanya pengaruh positif digitalisasi rantai pasokan terhadap integrasi rantai pasok. Hal ini juga didukung oleh Song dkk. (2021) yang melihat peran digitalisasi sebagai penggerak integrasi rantai pasok pada 188 *retailer* di China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki efek pendorong yang lebih kuat pada integrasi internal dan integrasi pelanggan.

Integrasi rantai pasok juga memiliki hubungan dengan resiliensi rantai pasok yang telah dibahas pada penelitian sebelumnya. Mandal dkk. (2017) menunjukkan bahwa kemampuan logistik memberikan pengaruh yang kuat terhadap resiliensi rantai pasokan melalui integrasi logistik yang efektif. Hal ini juga didukung oleh Zahid dkk. (2020) dan Tarigan dkk. (2021) yang menunjukkan adanya pengaruh integrasi rantai pasok terhadap resiliensi rantai pasok. Shi dkk. (2023) melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur di China menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi perusahaan tidak secara langsung terkait dengan ketahanan rantai pasokan, tetapi tingkat digitalisasi perusahaan memiliki dampak positif pada peningkatan integrasi rantai pasok. Hasil penelitian juga menunjukkan integrasi rantai pasok juga memiliki efek positif pada resiliensi rantai pasok. Integrasi rantai pasok memiliki efek mediasi terhadap hubungan digitalisasi dan resiliensi rantai pasok. Yuan dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa transformasi digital secara signifikan berdampak pada ketahanan rantai pasokan dan integrasi rantai pasok memainkan peran penting sebagai mediator dalam hubungan antara transformasi digital dan resiliensi rantai pasokan.

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk membantu IKM makanan di Kota Padang dalam meningkatkan resiliensi rantai pasok, maka perlu untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap resiliensi rantai pasok pada IKM makanan di Kota Padang dengan integrasi rantai pasok sebagai variabel mediasi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap resiliensi rantai pasok pada IKM makanan di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap integrasi rantai pasok pada IKM makanan di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh integrasi rantai pasok terhadap resiliensi rantai pasok pada IKM makanan di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh mediasi integrasi rantai pasok terhadap hubungan antara digitalisasi terhadap resiliensi rantai pasok pada IKM Makanan di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap resiliensi rantai pasok pada IKM makanan di Kota Padang.
2. Menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap integrasi rantai pasok pada IKM makanan di Kota Padang.
3. Menganalisis pengaruh integrasi rantai pasok terhadap resiliensi rantai pasok pada IKM makanan di Kota Padang.
4. Menganalisis pengaruh mediasi integrasi rantai pasok terhadap hubungan digitalisasi terhadap resiliensi rantai pasok pada IKM makanan di Kota Padang.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian hanya berfokus pada IKM makanan di Kota Padang karena Kota Padang memiliki nilai indeks ekosistem dan infrastruktur digital tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.
2. Penerapan digitalisasi pada IKM makanan di Kota Padang masih pada tahap awal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan memberikan pedoman pemecahan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Teori yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tahapan dalam penelitian antara lain studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, rumusan masalah, hipotesis penelitian, identifikasi indikator penelitian, validasi indikator penelitian, model konseptual, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penutup.

BAB IV PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan validasi indikator penelitian dan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* dengan *software* SmartPLS 3.0.

BAB V ANALISIS

Analisis lebih lanjut mengenai hasil yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bab ini. Analisis dilakukan pada masing-masing variabel penelitian yang diteliti.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

